

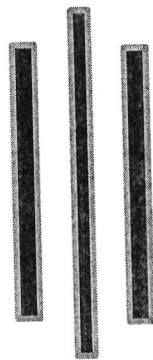


PERATURAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2015**



**PEMERINTAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR**

2014

DAFTAR ISI
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

KODE REKENING URUSAN PEMERINTAHAN	U R A I A N	HALAMAN
	BATANG TUBUH PERATURAN DAERAH NTT PROVINSI NTT NOMOR 10 TAHUN 2014	1 - 7
	LAMPIRAN I. : RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	8 - 9
	LAMPIRAN IA. : RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	10 - 31
	LAMPIRAN II. : RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI	32 - 34
	LAMPIRAN III. : RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN	
1.	URUSAN WAJIB	
1.01.	PENDIDIKAN	
1.01.01	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	35 - 38
1.02.	KESEHATAN	
1.02.01	Dinas Kesehatan	39 - 42
1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.W.Z Johannes	43 - 44
1.03.	PEKERJAAN UMUM	
1.03.06	Dinas Pekerjaan Umum	45 - 47
1.06.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	
1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	48 - 50
1.06.02	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	51 - 52
1.06.03.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	53 - 54
1.07.	PERHUBUNGAN	
1.07.01	Dinas Perhubungan	55 - 57
1.08.	LINGKUNGAN HIDUP	
1.08.01	Badan Lingkungan Hidup Daerah	58 - 60
1.11.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
1.11.01.	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	61 - 62
1.13.	SOSIAL	
1.13.01	Dinas Sosial	63 - 65
1.14.	KETENAGAKERJAAN	
1.14.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	66 - 68
1.15.	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
1.15.01	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	69 - 71
1.16.	PENANAMAN MODAL	
1.16.01	Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah	72 - 73

KODE REKENING URUSAN PEMERINTAHAN	U R A I A N	HALAMAN
1.18.	PEMUDA DAN OLAHRAGA	
1.18.01.	Dinas Pemuda dan Olahraga	74 - 75
1.19.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	
1.19.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	76 - 78
1.19.02	Satuan Polisi Pamong Praja	79 - 80
1.19.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	81 - 82
1.20.	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	
1.20.00.	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	83 - 83
1.20.01.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	84 - 84
1.20.02.	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	85 - 85
1.20.03.	Sekretariat Daerah :	
1.20.03.01.	Biro Umum	86 - 88
1.20.03.02.	Biro Keuangan	89 - 91
1.20.03.03.	Biro Hukum	92 - 93
1.20.03.04.	Biro Organisasi	94 - 95
1.20.03.05.	Biro Administrasi Pembangunan	96 - 97
1.20.03.06.	Biro Perekonomian	98 - 99
1.20.03.07.	Biro Kesejahteraan Rakyat	100 - 101
1.20.03.08.	Biro Pemerintahan	102 - 103
1.20.03.09.	Biro Hubungan Masyarakat	104 - 105
1.20.04.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	106 - 108
1.20.05.	Inspektorat	109 - 111
1.20.06.	Kantor Penghubung	112 - 113
1.20.07.	Dinas Pendapatan dan Aset Daerah	114 - 116
1.20.08.	Badan Pendidikan dan Pelatihan	117 - 118
1.20.09.	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	119 - 120
1.20.10.	Sekretariat Dewan KORPRI	121 - 122
1.20.11.	Badan Kepegawaian Daerah	123 - 125
1.21.	KETAHANAN PANGAN	
1.21.01.	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	126 - 128
1.22.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
1.22.01.	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	129 - 131
1.24.	KEARSIPAN	
1.24.01.	Badan Arsip	132 - 133
1.25.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
1.25.01.	Dinas Komunikasi dan Informatika	134 - 136
1.25.02.	Kantor Pengolahan Data Elektronik	137 - 138
1.25.03.	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah	139 - 140
1.26.	PERPUSTAKAAN	
1.26.01.	Badan Perpustakaan Daerah	141 - 143
2.	URUSAN PILIHAN	
2.01.	PERTANIAN	
2.01.01.	Dinas Pertanian dan Perkebunan	144 - 146
2.01.02.	Dinas Peternakan	147 - 149
2.02.	KEHUTANAN	
2.02.01.	Dinas Kehutanan	150 - 152
2.02.02.	Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Mutis Timau Unit XIX	153 - 154

KODE REKENING URUSAN PEMERINTAHAN	U R A I A N	HALAMAN
2.03.	ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	
2.03.01.	Dinas Pertambangan dan Energi	155 - 157
2.04.	PARIWISATA	
2.04.01.	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	158 - 160
2.05.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	
2.05.01.	Dinas Kelautan dan Perikanan	161 - 163
2.07.	PERINDUSTRIAN	
2.07.01.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	164 - 166
	LAMPIRAN IV. : REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN	167 - 213
	LAMPIRAN V. : REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	214 - 216
	LAMPIRAN VI. : DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PERJABATAN	217 - 217
	LAMPIRAN VII. DAFTAR PIUTANG (OBLIGASI) DAERAH	218 - 221
	LAMPIRAN VIII. DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH)	222 - 222
	LAMPIRAN IX. DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH	223 - 223
	LAMPIRAN X. DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN - LAIN	224 - 224
	LAMPIRAN XI. : DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI	225 - 225
	LAMPIRAN XII. DAFTAR DANA CADANGAN	226 - 226
	LAMPIRAN XIII : DAFTAR PINJAMAN DAERAH	227 - 227



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-4767 Tahun 2014 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 002 Seri A Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0012);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp. 3.282.665.033.900,-
2. Belanja	<u>Rp. 3.289.126.340.000,-</u> (-)
Surplus/(Defisit)	Rp (6.461.306.100,-)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	Rp. 61.161.306.100,-
b. Pengeluaran	<u>Rp. 54.700.000.000,-</u> (-)
Pembiayaan netto	Rp. 6.461.306.100,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. 0,-

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | |
|---|-------------------------|
| a. Pendapatan asli daerah | Rp. 829.811.061.900,- |
| b. Dana perimbangan | Rp. 1.481.037.037.000,- |
| c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah | Rp. 971.816.935.000,- |

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

- | | |
|--|-----------------------|
| a. Pajak daerah | Rp. 636.726.117.000,- |
| b. Retribusi daerah | Rp. 34.149.935.000,- |
| c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | Rp. 75.770.160.000,- |
| d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah | Rp. 83.164.849.900,- |

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| a. Dana bagi hasil pajak/bukan pajak | Rp. 95.100.772.000,- |
| b. Dana Alokasi Umum | Rp. 1.300.445.875.000,- |
| c. Dana Alokasi Khusus | Rp. 85.490.390.000,- |

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

- | | |
|--|-----------------------|
| a. Pendapatan Hibah | Rp. 11.321.669.000,- |
| b. Dana penyesuaian dan otonomi khusus | Rp. 954.743.400.000,- |
| c. Penerimaan dari Pihak Ketiga | Rp. 5.751.866.000,- |

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung | Rp. 2.053.350.765.000,- |
| b. Belanja Langsung | Rp. 1.235.775.575.000,- |

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| a. Belanja pegawai | Rp. 508.382.966.000,- |
| b. Belanja hibah | Rp. 1.152.778.400.000,- |
| c. Belanja bantuan sosial | Rp. 28.337.378.000,- |
| d. Belanja bagi hasil | Rp. 320.448.854.000,- |
| e. Belanja bantuan keuangan | Rp. 35.903.167.000,- |
| f. Belanja tidak terduga | Rp. 7.500.000.000,- |

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai	Rp. 92.573.078.806,-
b. Belanja-Belanja barang dan jasa	Rp. 581.066.051.075,-
c. Belanja Modal	Rp. 562.136.445.119,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 61.161.306.100,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 54.700.000.000,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya	Rp. 53.779.434.100,-
b. Penerimaan kembali Penerimaan Pinjaman	Rp. 7.381.872.000,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	Rp. 50.000.000.000,-
b. Pemberian Pinjaman Daerah	Rp. 4.700.000.000,-

Pasal 5

(1) Untuk melakukan pendanaan terhadap keadaan darurat, dilakukan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;

- c. kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi secara berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat, bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2014, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Kegiatan lain di luar tanggap darurat yang didanai melalui belanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja SKPD berkenaan.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- i. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
- k. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- l. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
- m. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 7

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 Desember 2014

M GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANSISKUS SALEM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2014
NOMOR 010

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSATENGGARA TIMUR
: (8 /2014)

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

Halaman : 8

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	PENDAPATAN DAERAH	3.282.665.033.900,00
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	829.811.061.900,00
1.1.1.	HASIL PAJAK DAERAH 1)	636.726.117.000,00
1.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	34.149.935.000,00
1.1.3.	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	75.770.160.000,00
1.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	83.164.849.900,00
1.2.	DANA PERIMBANGAN	1.481.037.037.000,00
1.2.1.	BAGI HASIL PAJAK / BAGI HASIL BUKAN PAJAK	95.100.772.000,00
1.2.2.	DANA ALOKASI UMUM	1.300.445.875.000,00
1.2.3.	DANA ALOKASI KHUSUS	85.490.390.000,00
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	971.816.935.000,00
1.3.1.	PENDAPATAN HIBAH	11.321.669.000,00
1.3.4.	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	954.743.400.000,00
1.3.6.	PENERIMAAN DARI PIHAK KETIGA	5.751.866.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	3.282.665.033.900,00
2.	BELANJA DAERAH	3.289.126.340.000,00
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.053.350.765.000,00
2.1.1.	BELANJA PEGAWAI	508.382.966.000,00
2.1.4.	BELANJA HIBAH	1.152.778.400.000,00
2.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	28.337.378.000,00
2.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	320.448.854.000,00
2.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	35.903.167.000,00
2.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.500.000.000,00
2.2.	BELANJA LANGSUNG	1.235.775.575.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
2.2.1.	BELANJA PEGAWAI	92.573.078.806,00
2.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	581.066.051.075,00
2.2.3.	BELANJA MODAL	562.136.445.119,00
	JUMLAH BELANJA	3.289.126.340.000,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(6.461.306.100,00)
3.	PEMBIAYAAN DAERAH	6.461.306.100,00
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	61.161.306.100,00
3.1.1.	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA	53.779.434.100,00
3.1.5.	PENERIMAAN KEMBALI DARI PEMBERIAN PINJAMAN	7.381.872.000,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	61.161.306.100,00
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	54.700.000.000,00
3.2.2.	PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH	50.000.000.000,00
3.2.4.	PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH	4.700.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	54.700.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETO	6.461.306.100,00
3.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	-


 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

 FRANS LEBU RAYA

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015

Halaman : 10

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	PENDAPATAN DAERAH	3.282.665.033.900,00
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	829.811.061.900,00
1.1.1.	HASIL PAJAK DAERAH 1)	636.726.117.000,00
1.1.1.01.	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	119.735.024.700,00
1.1.1.01.01.	A 1 SEDAN, JEEP, STATION WAGON, MINI BUS (TIDAK UMUM)	22.216.616.200,00
1.1.1.01.02.	A 1 SEDAN, JEEP, STATION WAGON, MINI BUS (UMUM)	2.979.961.000,00
1.1.1.01.03.	B 1 BUS, MICRO BUS (TIDAK UMUM)	256.339.700,00
1.1.1.01.04.	B 1 BUS, MICRO BUS (UMUM)	906.461.100,00
1.1.1.01.05.	C 1 TRUCK, PICK UP, LAIHT TRUK, DUMP TRUCK, BOX, TANGKI (TIDAK UMUM)	17.495.393.200,00
1.1.1.01.06.	C 1 TRUCK, PICK UP, LAIHT TRUK, DUMP TRUCK, BOX, TANGKI (UMUM)	12.339.837.300,00
1.1.1.01.07.	D 1 KENDARAAN KHUSUS (ALAT BESAR/BERAT DAN TRAKTOR)	115.499.100,00
1.1.1.01.09.	E-1 SEPEDA MOTOR, SCOOTER, RODA TIGA (TIDAK UMUM)	60.061.011.500,00
1.1.1.01.10.	A-1 SEDAN, JEEP, STATION WAGON, MINI BUS (DINAS)	1.610.465.600,00
1.1.1.01.12.	C-1 TRUCK, PICK UP, LAIHT TRUK, DUMP TRUCK, BOX, TANGKI (DINAS)	744.680.800,00
1.1.1.01.13.	E-1 SEPEDA MOTOR, SCOOTER, RODA TIGA (DINAS)	941.862.800,00
1.1.1.01.14.	B-1 BUS, MICRO BUS (DINAS)	66.896.400,00
1.1.1.03.	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR	171.000.000.000,00
1.1.1.03.01.	A 1 SEDAN, JEEP, STATION WAGON, MINI BUS (TIDAK UMUM)	41.600.000.000,00
1.1.1.03.02.	A 1 SEDAN, JEEP, STATION WAGON, MINI BUS (UMUM)	3.625.000.000,00
1.1.1.03.03.	B 1 BUS, MICRO BUS (TIDAK UMUM)	1.225.000.000,00
1.1.1.03.04.	B 1 BUS, MICRO BUS (UMUM)	2.067.500.000,00
1.1.1.03.05.	C 1 TRUCK, PICK UP, LAIHT TRUK, DUMP TRUK, BOX, TANGKI (TIDAK UMUM)	36.450.000.000,00
1.1.1.03.06.	C 1 TRUCK, PICK UP, LAIHT TRUK, DUMP TRUK, BOX, TANGKI (UMUM)	14.950.000.000,00
1.1.1.03.09.	E 1 SEPEDA MOTOR, SCOOTER, RODA TIGA (TIDAK UMUM)	67.760.000.000,00
1.1.1.03.10.	A1 SEDAN, JEEP, STATION WAGON, MINI BUS (DINAS)	1.300.000.000,00
1.1.1.03.11.	C-1 TRUCK, PICK UP, LAIHT TRUK, DUMP TRUCK, BOX, TANGKI (DINAS)	540.000.000,00
1.1.1.03.12.	E-1 SEPEDA MOTOR, SCOOTER, RODA TIGA (DINAS)	990.000.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.1.1.03.13.	B-1 BUS, MICRO BUS (DINAS)	367.500.000,00
1.1.1.03.14.	D3. ALAT BERAT (TIDAK UMUM)	125.000.000,00
1.1.1.05.	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR	125.000.000.000,00
1.1.1.05.01.	PERMIUM	75.000.000.000,00
1.1.1.05.04.	SOLAR	50.000.000.000,00
1.1.1.06.	PAJAK AIR PERMUKAAN	250.000.000,00
1.1.1.06.01.	PAJAK AIR PERMUKAAN	250.000.000,00
1.1.1.07.	PAJAK ROKOK	220.741.092.300,00
1.1.1.07.01.	PAJAK ROKOK.	220.741.092.300,00
1.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	34.149.935.000,00
1.1.2.01.	RETRIBUSI JASA UMUM	18.149.595.000,00
1.1.2.01.01.	RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK PETA	19.600.000,00
1.1.2.01.02.	RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG	230.000.000,00
1.1.2.01.03.	RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN	17.519.660.000,00
1.1.2.01.04.	RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	380.335.000,00
1.1.2.02.	RETRIBUSI JASA USAHA	15.896.900.000,00
1.1.2.02.01.	RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	8.739.531.500,00
1.1.2.02.03.	RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH	6.407.793.500,00
1.1.2.02.04.	RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN	302.975.000,00
1.1.2.02.05.	RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA	366.600.000,00
1.1.2.02.06.	RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR	40.000.000,00
1.1.2.02.07.	RETRIBUSI PELAYANAN ALSINTAN	40.000.000,00
1.1.2.03.	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	103.440.000,00
1.1.2.03.01.	RETRIBUSI IZIN TRAYEK	103.440.000,00
1.1.3.	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	75.770.160.000,00
1.1.3.01.	BAGIAN LABA ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	30.160.000,00
1.1.3.01.02.	PT.SASANDO INTERNATIONAL HOTEL	30.160.000,00
1.1.3.02.	BAGIAN LABA ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK PEMERINTAH/BUMN	72.500.000,00
1.1.3.02.02.	PT. ASKRIDA	72.500.000,00
1.1.3.04.	BAGIAN LABA LEMBAGA KEUANGAN	75.667.500.000,00
1.1.3.04.01.	PT. BANK NTT	75.667.500.000,00
1.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	83.164.849.900,00
1.1.4.02.	PENERIMAAN JASA GIRO	8.650.000.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.1.4.02.01.	JASA GIRO KAS DAERAH	8.650.000.000,00
1.1.4.03.	PENDAPATAN BUNGA	7.035.449.900,00
1.1.4.03.01.	PENDAPATAN BUNGA DEPOSITO PADA BANK	6.500.000.000,00
1.1.4.03.04.	PENDAPATAN BUNGA DARI PEMBERIAN PINJAMAN KEPADA MASYARAKAT	535.449.900,00
1.1.4.04.	TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH	500.000.000,00
1.1.4.04.01.	KERUGIAN UANG DAERAH	500.000.000,00
1.1.4.06.	PENDAPATAN DENDA ATAS KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN	608.400.000,00
1.1.4.06.01.	BIDANG PENDIDIKAN	8.400.000,00
1.1.4.06.03.	BIDANG PEKERJAAN UMUM	600.000.000,00
1.1.4.07.	PENDAPATAN DENDA PAJAK 1)	2.450.000.000,00
1.1.4.07.01.	PENDAPATAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	2.200.000.000,00
1.1.4.07.02.	PENDAPATAN DENDA PAJAK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR	250.000.000,00
1.1.4.10.	PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN	100.000.000,00
1.1.4.10.01.	PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21	10.000.000,00
1.1.4.10.03.	PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN	30.000.000,00
1.1.4.10.04.	PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS	60.000.000,00
1.1.4.12.	PENDAPATAN DARI ANGSURAN/CICILAN PENJUALAN	225.000.000,00
1.1.4.12.01.	ANGSURAN/CICILAN RUMAH DINAS	10.000.000,00
1.1.4.12.02.	ANGSURAN/CICILAN PENJUALAN KENDARAAN DINAS	215.000.000,00
1.1.4.13.	PENDAPATAN HASIL SEWA ASET DAERAH	96.000.000,00
1.1.4.13.01.	SEWA TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH	95.500.000,00
1.1.4.13.03.	SEWA MESS/RUMAH MILIK PEMERINTAH DAERAH	500.000,00
1.1.4.15.	PENDAPATAN BLUD	63.500.000.000,00
1.1.4.15.01.	PENDAPATAN JASA LAYANAN	63.500.000.000,00
1.2.	DANA PERIMBANGAN	1.481.037.037.000,00
1.2.1.	BAGI HASIL PAJAK / BAGI HASIL BUKAN PAJAK	95.100.772.000,00
1.2.1.01.	BAGI HASIL PAJAK	89.685.140.000,00
1.2.1.01.01.	BAGI HASIL DARI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	39.118.997.000,00
1.2.1.01.03.	BAGI HASIL DARI PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PPH PASAL 21	38.472.060.000,00
1.2.1.01.04.	DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU	12.094.083.000,00
1.2.1.02.	BAGI HASIL BUKAN PAJAK / SUMBER DAYA ALAM	5.415.632.000,00
1.2.1.02.01.	BAGI HASIL DARI PROVISI SUMBER DAYA HUTAN	57.512.000,00
1.2.1.02.12.	SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN UMUM	5.358.120.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.2.2.	DANA ALOKASI UMUM	1.300.445.875.000,00
1.2.2.01.	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1.300.445.875.000,00
1.2.2.01.01.	DANA ALOKASI UMUM	1.300.445.875.000,00
1.2.3.	DANA ALOKASI KHUSUS	85.490.390.000,00
1.2.3.01.	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	85.490.390.000,00
1.2.3.01.01.	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK).	85.490.390.000,00
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	971.816.935.000,00
1.3.1.	PENDAPATAN HIBAH	11.321.669.000,00
1.3.1.01.	PENDAPATAN HIBAH DARI PEMERINTAH	8.683.029.000,00
1.3.1.01.01.	PENDAPATAN HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT	8.683.029.000,00
1.3.1.02.	PENDAPATAN HIBAH DARI PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	2.000.000.000,00
1.3.1.02.01.	PENDAPATAN HIBAH DARI PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	2.000.000.000,00
1.3.1.03.	PENDAPATAN HIBAH DARI BADAN / LEMBAGA / ORGANISASI SWASTA DALAM NEGERI	638.640.000,00
1.3.1.03.01.	PT. JASA RAHARJA	638.640.000,00
1.3.4.	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	954.743.400.000,00
1.3.4.01.	DANA PENYESUAIAN	954.743.400.000,00
1.3.4.01.03.	BOS SATUAN PENDIDIKAN DASAR	954.743.400.000,00
1.3.6.	PENERIMAAN DARI PIHAK KETIGA	5.751.866.000,00
1.3.6.01.	SUMBANGAN PIHAK KETIGA	5.751.866.000,00
1.3.6.01.01.	SUMBANGAN PIHAK KETIGA DEALER	4.200.655.000,00
1.3.6.01.02.	SUMBANGAN PIHAK KETIGA DARI PELAYANAN PERIJINAN	1.000.000.000,00
1.3.6.01.04.	SUMBANGAN PIHAK KETIGA DARI PLAT KENDARAAN LUAR DAERAH	551.211.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	3.282.665.033.900,00
2.	BELANJA DAERAH	3.289.126.340.000,00
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.053.350.765.000,00
2.1.1.	BELANJA PEGAWAI	508.382.966.000,00
2.1.1.01.	GAJI DAN TUNJANGAN	365.414.791.000,00
2.1.1.01.01.	GAJI POKOK PNS	265.100.370.602,00
2.1.1.01.02.	TUNJANGAN KELUARGA	23.840.309.246,00
2.1.1.01.03.	TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL	14.857.398.235,00
2.1.1.01.04.	TUNJANGAN FUNGSIONAL	6.747.937.400,00
2.1.1.01.05.	TUNJANGAN UMUM	10.970.782.625,00
2.1.1.01.06.	TUNJANGAN BERAS	20.651.818.176,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
2.1.1.01.07.	TUNJANGAN PPH/TUNJANGAN KHUSUS	4.972.874.634,00
2.1.1.01.08.	PEMBULATAN GAJI	14.788.391,00
2.1.1.01.09.	IURAN JAMINAN KESEHATAN	8.667.657.998,00
2.1.1.01.10.	UANG PAKET	176.940.000,00
2.1.1.01.11.	TUNJANGAN BADAN MUSYAWARAH	64.467.000,00
2.1.1.01.12.	TUNJANGAN KOMISI	126.585.000,00
2.1.1.01.13.	TUNJANGAN BADAN ANGGARAN	64.467.000,00
2.1.1.01.14.	TUNJANGAN BADAN KEHORMATAN	18.009.000,00
2.1.1.01.15.	TUNJANGAN ALAT KELENGKAPAN LAINNYA	200.000.000,00
2.1.1.01.16.	TUNJANGAN PERUMAHAN	6.588.000.000,00
2.1.1.01.18.	UANG JASA PENGABDIAN	749.700.000,00
2.1.1.01.20.	TUNJANGAN BADAN LEGISLASI	64.467.000,00
2.1.1.01.22.	IURAN JAMINAN KETENAGAKERJAAN	1.538.218.693,00
2.1.1.02.	TAMBAHAN PENGHASILAN PNS	113.858.792.000,00
2.1.1.02.05.	TAMBAHAN PENGHASILAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN UMUM	113.858.792.000,00
2.1.1.03.	BELANJA PENERIMAAN LAINNYA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA KDH/WKDH	8.831.600.000,00
2.1.1.03.01.	BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD	561.600.000,00
2.1.1.03.02.	BELANJA TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	7.020.000.000,00
2.1.1.03.03.	BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	1.250.000.000,00
2.1.1.04.	INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH	19.795.377.000,00
2.1.1.04.01.	INSENTIF PEMUNGUTAN PBB	693.594.000,00
2.1.1.04.02.	INSENTIF PEMUNGUTAN PKB DAN BBN - KB	8.722.050.500,00
2.1.1.04.03.	INSENTIF PEMUNGUTAN PBB - KB	3.750.000.000,00
2.1.1.04.04.	INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN (AP)	7.500.000,00
2.1.1.04.05.	INSENTIF PAJAK ROKOK	6.622.232.500,00
2.1.1.05.	INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH	482.406.000,00
2.1.1.05.01.	INSENTIF RETRIBUSI DAERAH	482.406.000,00
2.1.4.	BELANJA HIBAH	1.152.778.400.000,00
2.1.4.01.	BELANJA HIBAH KEPADA PEMERINTAH PUSAT	1.345.000.000,00
2.1.4.01.02.	INSTANSI VERTIKAL	1.345.000.000,00
2.1.4.04.	BELANJA HIBAH KEPADA MASYARAKAT	176.700.000.000,00
2.1.4.04.01.	KELOMPOK MASYARAKAT BIDANG PEREKONOMIAN	176.700.000.000,00
2.1.4.05.	BELANJA HIBAH KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN	19.990.000.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
2.1.4.05.01.	ORGANISASI KEMASYARAKATAN BIDANG PEREKONOMIAN	1.750.000.000,00
2.1.4.05.02.	ORGANISASI KEMASYARAKATAN BIDANG PENDIDIKAN	5.515.000.000,00
2.1.4.05.03.	ORGANISASI KEMASYARAKATAN BIDANG KESEHATAN	1.850.000.000,00
2.1.4.05.04.	ORGANISASI KEMASYARAKATAN BIDANG KEAGAMAAN	4.475.000.000,00
2.1.4.05.07.	ORGANISASI KEMASYARAKATAN BIDANG PEMUDA DAN KEOLAHRAGAAN	5.700.000.000,00
2.1.4.05.08.	ORGANISASI KEMASYARAKATAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	500.000.000,00
2.1.4.05.09.	ORGANISASI KEMASYARAKATAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI	200.000.000,00
2.1.4.06.	BELANJA HIBAH BOS KEPADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR	954.743.400.000,00
2.1.4.06.01.	BELANJA HIBAH KEPADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR	954.743.400.000,00
2.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	28.337.378.000,00
2.1.5.01.	BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA INDIVIDU DAN/ATAU KELUARGA	24.339.878.000,00
2.1.5.01.01.	YANG DAPAT DIRENCANAKAN	19.967.000.000,00
2.1.5.01.02.	YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN	4.372.878.000,00
2.1.5.02.	BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA MASYARAKAT	1.419.000.000,00
2.1.5.02.01.	BELANJA BANTUAN SOSIAL KELOMPOK MASYARAKAT BIDANG PEREKONOMIAN	542.000.000,00
2.1.5.02.03.	BELANJA BANTUAN SOSIAL KELOMPOK MASYARAKAT BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL	727.000.000,00
2.1.5.02.04.	BELANJA BANTUAN SOSIAL KELOMPOK MASYARAKAT BIDANG KEAGAMAAN	150.000.000,00
2.1.5.03.	BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA LEMBAGA NON PEMERINTAH	2.578.500.000,00
2.1.5.03.01.	BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA LEMBAGA NON PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN	100.000.000,00
2.1.5.03.03.	BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA LEMBAGA NON PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN	2.478.500.000,00
2.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	320.448.854.000,00
2.1.6.02.	BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA KABUPATEN/KOTA	319.498.254.000,00
2.1.6.02.01.	BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA KOTA KUPANG	38.712.839.394,00
2.1.6.02.02.	BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA KABUPATEN KUPANG	19.187.555.378,00
2.1.6.02.03.	BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA KABUPATEN SABU RAIJUA	7.938.442.010,00
2.1.6.02.04.	BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA KABUPATEN ROTE NDAO	9.885.547.416,00
2.1.6.02.05.	BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA KABUPATEN TTS	20.332.380.108,00
2.1.6.02.06.	BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA KABUPATEN TTU	14.840.640.497,00
2.1.6.02.07.	BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA KABUPATEN BELU	16.459.148.559,00
2.1.6.02.08.	BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA KABUPATEN ALOR	12.061.235.719,00
2.1.6.02.09.	BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA KABUPATEN FLORES TIMUR	13.857.116.217,00
2.1.6.02.10.	BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA KABUPATEN LEMBATA	9.790.521.957,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
2.1.6.02.11.	BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA KABUPATEN SIKKA	18.035.777.060,00
2.1.6.02.12.	BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA KABUPATEN ENDE	16.081.993.300,00
2.1.6.02.13.	BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA KABUPATEN NGADA	11.177.239.701,00
2.1.6.02.14.	BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA KABUPATEN NAGEKEO	10.166.005.624,00
2.1.6.02.15.	BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA KABUPATEN MANGGARAI	17.581.895.654,00
2.1.6.02.16.	BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	13.264.879.343,00
2.1.6.02.17.	BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA KABUPATEN MANGGARAI BARAT	13.772.587.949,00
2.1.6.02.18.	BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA KABUPATEN SUMBA TIMUR	14.419.811.500,00
2.1.6.02.19.	BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA KABUPATEN SUMBA BARAT	10.082.455.081,00
2.1.6.02.20.	BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	13.845.021.522,00
2.1.6.02.21.	BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA KABUPATEN SUMBA TENGAH	7.866.414.446,00
2.1.6.02.22.	BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA KABUPATEN MALAKA	10.138.745.565,00
2.1.6.04.	BELANJA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA KABUPATEN/KOTA	950.600.000,00
2.1.6.04.01.	BELANJA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA KOTA KUPANG	7.469.000,00
2.1.6.04.02.	BELANJA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA KABUPATEN KUPANG	151.417.000,00
2.1.6.04.03.	BELANJA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA KABUPATEN SABU RAIJUA	10.185.000,00
2.1.6.04.04.	BELANJA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA KABUPATEN ROTE NDAO	50.246.000,00
2.1.6.04.05.	BELANJA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA KABUPATEN TTS	163.639.000,00
2.1.6.04.06.	BELANJA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA KABUPATEN TTU	109.998.000,00
2.1.6.04.07.	BELANJA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA KABUPATEN BELU	74.011.000,00
2.1.6.04.11.	BELANJA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA KABUPATEN SIKKA	16.975.000,00
2.1.6.04.12.	BELANJA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA KABUPATEN ENDE	21.728.000,00
2.1.6.04.13.	BELANJA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA KABUPATEN NGADA	25.802.000,00
2.1.6.04.14.	BELANJA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA KABUPATEN NAGEKEO	29.876.000,00
2.1.6.04.15.	BELANJA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA KABUPATEN MANGGARAI	29.197.000,00
2.1.6.04.16.	BELANJA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	11.543.000,00
2.1.6.04.17.	BELANJA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA KABUPATEN MANGGARAI BARAT	23.086.000,00
2.1.6.04.18.	BELANJA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA KABUPATEN SUMBA TIMUR	127.652.000,00
2.1.6.04.19.	BELANJA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA KABUPATEN SUMBA BARAT	6.790.000,00
2.1.6.04.20.	BELANJA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	12.901.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
2.1.6.04.21.	BELANJA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA KABUPATEN SUMBA TENGAH	13.580.000,00
2.1.6.04.22.	BELANJA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA KABUPATEN MALAKA	64.505.000,00
2.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	35.903.167.000,00
2.1.7.02.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA	28.968.250.000,00
2.1.7.02.01.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KOTA KUPANG	2.200.000.000,00
2.1.7.02.02.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN KUPANG	2.475.000.000,00
2.1.7.02.03.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN SABU RAIJUA	585.000.000,00
2.1.7.02.04.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN ROTE NDAO	885.000.000,00
2.1.7.02.05.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN TTS	2.985.000.000,00
2.1.7.02.06.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN TTU	1.350.000.000,00
2.1.7.02.07.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN BELU	255.000.000,00
2.1.7.02.08.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN ALOR	1.605.000.000,00
2.1.7.02.09.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN FLORES TIMUR	1.275.000.000,00
2.1.7.02.10.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN LEMBATA	1.245.000.000,00
2.1.7.02.11.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN SIKKA	1.763.250.000,00
2.1.7.02.12.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN ENDE	2.340.000.000,00
2.1.7.02.13.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN NGADA	225.000.000,00
2.1.7.02.14.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN NAGEKEO	1.170.000.000,00
2.1.7.02.15.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN MANGGARAI	1.305.000.000,00
2.1.7.02.16.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	795.000.000,00
2.1.7.02.17.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN MANGGARAI BARAT	330.000.000,00
2.1.7.02.18.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN SUMBA TIMUR	1.485.000.000,00
2.1.7.02.19.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN SUMBA BARAT	135.000.000,00
2.1.7.02.20.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	915.000.000,00
2.1.7.02.21.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN SUMBA TENGAH	495.000.000,00
2.1.7.02.22.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN MALAKA	150.000.000,00
2.1.7.02.23.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DAERAH (KABUPATEN/KOTA) OTONOMI BARU	3.000.000.000,00
2.1.7.03.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA	5.445.000.000,00
2.1.7.03.01.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA DI KABUPATEN KUPANG	301.500.000,00
2.1.7.03.02.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA DI KABUPATEN SABU RAIJUA	103.500.000,00
2.1.7.03.03.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA DI KABUPATEN ROTE NDAO	153.000.000,00
2.1.7.03.04.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA DI KABUPATEN TTS	506.250.000,00
2.1.7.03.05.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA DI KABUPATEN TTU	261.000.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
2.1.7.03.06.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA DI KABUPATEN BELU	121.500.000,00
2.1.7.03.07.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA DI KABUPATEN ALOR	299.250.000,00
2.1.7.03.08.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA DI KABUPATEN FLORES TIMUR	425.250.000,00
2.1.7.03.09.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA DI KABUPATEN LEMBATA	254.250.000,00
2.1.7.03.10.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA DI KABUPATEN SIKKA	272.250.000,00
2.1.7.03.11.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA DI KABUPATEN ENDE	483.750.000,00
2.1.7.03.12.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA DI KABUPATEN NGADA	240.750.000,00
2.1.7.03.13.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA DI KABUPATEN NAGEKEO	168.750.000,00
2.1.7.03.14.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA DI KABUPATEN MANGGARAI	261.000.000,00
2.1.7.03.15.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA DI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	279.000.000,00
2.1.7.03.16.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT	294.750.000,00
2.1.7.03.17.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA DI KABUPATEN SUMBA TIMUR	265.500.000,00
2.1.7.03.18.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA DI KABUPATEN SUMBA BARAT	119.250.000,00
2.1.7.03.19.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	231.750.000,00
2.1.7.03.20.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA DI KABUPATEN SUMBA TENGAH	117.000.000,00
2.1.7.03.21.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA DI KABUPATEN MALAKA	285.750.000,00
2.1.7.05.	BELANJA BANTUAN PARTAI POLITIK	1.489.917.000,00
2.1.7.05.01.	BELANJA BANTUAN PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)	155.931.000,00
2.1.7.05.02.	BELANJA BANTUAN PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	116.249.000,00
2.1.7.05.03.	BELANJA BANTUAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	59.790.000,00
2.1.7.05.04.	BELANJA BANTUAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	242.762.000,00
2.1.7.05.05.	BELANJA BANTUAN PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	237.810.000,00
2.1.7.05.06.	BELANJA BANTUAN PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	165.077.000,00
2.1.7.05.07.	BELANJA BANTUAN PARTAI DEMOKRAT	151.585.000,00
2.1.7.05.08.	BELANJA BANTUAN PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	119.571.000,00
2.1.7.05.09.	BELANJA BANTUAN PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	27.663.000,00
2.1.7.05.10.	BELANJA BANTUAN PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	101.883.000,00
2.1.7.05.14.	BELANJA BANTUAN PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	39.009.000,00
2.1.7.05.15.	BELANJA BANTUAN PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)	72.587.000,00
2.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.500.000.000,00
2.1.8.01.	BELANJA TIDAK TERDUGA.	7.500.000.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
2.1.8.01.01.	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.500.000.000,00
2.2.	BELANJA LANGSUNG	1.235.775.575.000,00
2.2.1.	BELANJA PEGAWAI	92.573.078.806,00
2.2.1.01.	HONORARIUM PNS	13.752.765.000,00
2.2.1.01.01.	HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN	8.363.651.000,00
2.2.1.01.02.	HONORARIUM PEJABAT/PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA DAN KELOMPOK UNIT KERJA LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	425.600.000,00
2.2.1.01.03.	HONORARIUM PENGELOLA APBD	3.518.564.000,00
2.2.1.01.04.	HONORARIUM PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN	411.550.000,00
2.2.1.01.05.	HONORARIUM SOPIR	236.400.000,00
2.2.1.01.06.	HONORARIUM PETUGAS LAPANGAN / PENGAWAS	608.100.000,00
2.2.1.01.07.	HONORARIUM PETUGAS SISTEM INFORMASI DAN TATA USAHA PIMPINAN	188.900.000,00
2.2.1.02.	HONORARIUM NON PNS	67.922.350.806,00
2.2.1.02.01.	HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP	58.641.419.456,00
2.2.1.02.02.	UPAH KERJA	6.497.731.350,00
2.2.1.02.03.	HONORARIUM PETUGAS KEAMANAN	365.500.000,00
2.2.1.02.04.	HONORARIUM PETUGAS HARIAN LEPAS	2.417.700.000,00
2.2.1.03.	UANG LEMBUR	5.899.041.000,00
2.2.1.03.01.	UANG LEMBUR PEGAWAI	5.899.041.000,00
2.2.1.06.	BELANJA PEGAWAI BLUD	4.998.922.000,00
2.2.1.06.01.	BELANJA PEGAWAI BLUD.	4.998.922.000,00
2.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	581.066.051.075,00
2.2.2.01.	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	17.223.754.795,00
2.2.2.01.01.	BELANJA ALAT TULIS KANTOR	7.336.404.185,00
2.2.2.01.02.	BELANJA ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK	1.199.560.975,00
2.2.2.01.03.	BELANJA PERANGKO, MATERAI DAN BENDA POS LAINNYA	873.927.725,00
2.2.2.01.04.	BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH	2.087.702.400,00
2.2.2.01.05.	BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK/GAS	828.080.000,00
2.2.2.01.06.	BELANJA PENGISIAN TABUNG PEMADAM KEBAKARAN	10.550.000,00
2.2.2.01.07.	BELANJA PENGISIAN TABUNG GAS	24.100.000,00
2.2.2.01.09.	BELANJA TANDA PENGHARGAAN	187.565.000,00
2.2.2.01.10.	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS RUANGAN RUMAH SAKIT	1.104.213.510,00
2.2.2.01.11.	BELANJA ALAT KESEHATAN PAKAI HABIS	532.831.000,00
2.2.2.01.12.	BELANJA BAHAN HABIS PAKAI REAGENSIA	2.038.820.000,00
2.2.2.01.13.	BELANJA BAHAN HABIS PAKAI HAEMODIALISA	500.000.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
2.2.2.01.14.	BELANJA BAHAN HABIS PAKAI RADIOLOGI	500.000.000,00
2.2.2.02.	BELANJA BAHAN/MATERIAL	49.368.671.750,00
2.2.2.02.01.	BELANJA BAHAN BAKU BANGUNAN	4.642.671.900,00
2.2.2.02.02.	BELANJA TANAMAN / BIBIT TANAMAN	17.411.578.500,00
2.2.2.02.03.	BELANJA TERNAK/BIBIT TERNAK	1.520.000.000,00
2.2.2.02.04.	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN	9.631.438.550,00
2.2.2.02.05.	BELANJA BAHAN KIMIA	664.100.000,00
2.2.2.02.06.	BELANJA BAHAN PENUNJANG LABORATORIUM	588.043.500,00
2.2.2.02.07.	BELANJA BAHAN PERCONTOHAN/PAMERAN/PROMOSI	752.744.900,00
2.2.2.02.08.	BELANJA BAHAN PRAKTEK/PERLENGKAPAN PELATIHAN	1.547.780.100,00
2.2.2.02.09.	BELANJA PIALA / TROPI KEJUARAAN / HADIAH LOMBA	1.857.823.500,00
2.2.2.02.10.	BELANJA CINDERAMATA / SOUVENIR	4.001.625.000,00
2.2.2.02.11.	BELANJA ALAT BERMAIN / PERAGA	479.250.000,00
2.2.2.02.12.	BELANJA PERALATAN PERTANIAN	284.715.000,00
2.2.2.02.13.	BELANJA BAHAN BAKU TENUNAN	13.200.000,00
2.2.2.02.14.	BELANJA BAHAN PENUNJANG PERBENGKELAN	83.194.000,00
2.2.2.02.15.	BELANJA BAHAN KOMPOS	85.250.000,00
2.2.2.02.16.	BELANJA BAHAN MAKANAN TERNAK/PAKAN TERNAK	5.737.106.800,00
2.2.2.02.17.	BELANJA MATERIAL PEMBUATAN TANDA-TANDA PERINGATAN BAHAYA	52.000.000,00
2.2.2.02.18.	BELANJA BENDERA DAN UMBUL-UMBUL	16.150.000,00
2.2.2.03.	BELANJA JASA KANTOR	109.738.773.977,00
2.2.2.03.01.	BELANJA TELEPON	2.680.044.200,00
2.2.2.03.02.	BELANJA AIR	2.275.783.000,00
2.2.2.03.03.	BELANJA LISTRIK	7.834.968.162,00
2.2.2.03.04.	BELANJA JASA PENYUSUNAN WEBSITE	190.158.000,00
2.2.2.03.05.	BELANJA SURAT KABAR/MAJALAH	1.099.827.000,00
2.2.2.03.06.	BELANJA KAWAT/FAKSIMILI/INTERNET	7.951.607.300,00
2.2.2.03.07.	BELANJA PAKET/PENGIRIMAN/PENGEPAKAN	2.780.719.700,00
2.2.2.03.08.	BELANJA SERTIFIKASI	3.530.575.000,00
2.2.2.03.09.	BELANJA JASA TRANSAKSI KEUANGAN	355.000,00
2.2.2.03.11.	BELANJA JASA KESENIAN	376.000.000,00
2.2.2.03.12.	BELANJA TRANSPORTASI DAN AKOMODASI	45.669.065.565,00
2.2.2.03.13.	BELANJA DOKUMENTASI	748.411.900,00
2.2.2.03.14.	BELANJA DEKORASI	1.940.175.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
2.2.2.03.15.	BELANJA JASA PEMERIKSAAN	687.910.000,00
2.2.2.03.16.	BELANJA PUBLIKASI	5.356.286.550,00
2.2.2.03.17.	BELANJA JASA PENGUBURAN JENASAH TIDAK MAMPU/TIDAK DIKENAL	45.000.000,00
2.2.2.03.18.	BELANJA JASA PENINGKATAN DAYA LISTRIK	57.500.000,00
2.2.2.03.21.	BELANJA JASA PENYUSUNAN BUKU	1.837.000.000,00
2.2.2.03.23.	BELANJA JASA TATA RIAS	54.650.000,00
2.2.2.03.24.	BELANJA JASA ADMINISTRASI PUNGUTAN PBB	14.400.000,00
2.2.2.03.25.	BELANJA JASA PEMBERSIHAN	235.950.000,00
2.2.2.03.26.	BELANJA JASA PENGGANTI BIAYA ADMINSTRASI	28.750.000,00
2.2.2.03.27.	BELANJA JASA KALIBRASI	105.300.000,00
2.2.2.03.28.	BELANJA JASA KEAMANAN	382.000.000,00
2.2.2.03.29.	BELANJA JASA ANGKUT BAHAN	160.175.600,00
2.2.2.03.30.	BELANJA JASA TENAGA AHLI / INSTUKTUR / NARASUMBER/ MODERATOR	21.731.962.000,00
2.2.2.03.31.	BELANJA JASA PIHAK KETIGA	1.702.200.000,00
2.2.2.03.32.	BELANJA IURAN	45.000.000,00
2.2.2.03.33.	BELANJA JASA IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)	217.000.000,00
2.2.2.04.	BELANJA PREMI ASURANSI	9.016.000.000,00
2.2.2.04.02.	BELANJA PREMI ASURANSI BARANG MILIK DAERAH	1.516.000.000,00
2.2.2.04.03.	BELANJA IURAN JAMINAN KESEHATAN	7.500.000.000,00
2.2.2.05.	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	10.106.559.694,00
2.2.2.05.01.	BELANJA JASA SERVICE	1.432.848.944,00
2.2.2.05.02.	BELANJA PENGGANTIAN SUKU CADANG	2.249.898.100,00
2.2.2.05.03.	BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK/GAS DAN PELUMAS	5.461.917.750,00
2.2.2.05.04.	BELANJA JASA KIR	34.800.000,00
2.2.2.05.05.	BELANJA SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN ^u	673.944.900,00
2.2.2.05.06.	BELANJA SURAT IJIN MENGEMUDI 1)	5.700.000,00
2.2.2.05.07.	BELANJA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	247.450.000,00
2.2.2.06.	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	15.899.210.846,00
2.2.2.06.01.	BELANJA CETAK	9.083.013.765,00
2.2.2.06.02.	BELANJA PENGGANDAAN	5.564.797.031,00
2.2.2.06.03.	BELANJA JILID	1.251.400.050,00
2.2.2.07.	BELANJA SEWA RUMAH / GEDUNG / GUDANG / PARKIR	4.815.775.000,00
2.2.2.07.01.	BELANJA SEWA RUMAH JABATAN / RUMAH DINAS	220.800.000,00
2.2.2.07.02.	BELANJA SEWA GEDUNG / KANTOR / TEMPAT	2.171.100.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
2.2.2.07.03.	BELANJA SEWA RUANG RAPAT / PERTEMUAN	2.423.875.000,00
2.2.2.08.	BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS	3.344.400.000,00
2.2.2.08.01.	BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS DARAT	2.801.900.000,00
2.2.2.08.02.	BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS AIR	242.500.000,00
2.2.2.08.03.	BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS UDARA	300.000.000,00
2.2.2.10.	BELANJA SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	1.850.263.000,00
2.2.2.10.01.	BELANJA SEWA MEJA KURSI	336.221.000,00
2.2.2.10.02.	BELANJA SEWA KOMPUTER DAN PRINTER	91.000.000,00
2.2.2.10.03.	BELANJA SEWA PROYEKTOR	600.000,00
2.2.2.10.04.	BELANJA SEWA GENERATOR	43.850.000,00
2.2.2.10.05.	BELANJA SEWA TENDA	536.700.000,00
2.2.2.10.06.	BELANJA SEWA PAKAIAN ADAT/TRADISIONAL	47.146.000,00
2.2.2.10.07.	BELANJA SEWA PANGGUNG	155.100.000,00
2.2.2.10.08.	BELANJA SEWA ALAT LISTRIK	22.500.000,00
2.2.2.10.09.	BELANJA SEWA ALAT MUSIK	3.000.000,00
2.2.2.10.10.	BELANJA SEWA PERALATAN STUDIO SOUND SYSTEM	493.000.000,00
2.2.2.10.13.	BELANJA SEWA PERALATAN PRAKTEK/PELATIHAN	41.646.000,00
2.2.2.10.14.	BELANJA SEWA PERALATAN LOMBA	54.500.000,00
2.2.2.10.16.	BELANJA SEWA JARINGAN INTERNET	25.000.000,00
2.2.2.11.	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	50.637.097.750,00
2.2.2.11.01.	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN PEGAWAI	45.895.750,00
2.2.2.11.02.	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT	12.037.452.700,00
2.2.2.11.03.	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN TAMU	5.576.636.800,00
2.2.2.11.04.	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN	25.766.835.500,00
2.2.2.11.05.	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RUMAH TANGGA PIMPINAN DAERAH	660.000.000,00
2.2.2.11.06.	BELANJA BAHAN MAKANAN	6.506.037.000,00
2.2.2.11.07.	BELANJA BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH	44.240.000,00
2.2.2.12.	BELANJA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUTNYA	791.770.000,00
2.2.2.12.01.	BELANJA PAKAIAN DINAS KDH DAN WKDH	150.000.000,00
2.2.2.12.02.	BELANJA PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)	214.500.000,00
2.2.2.12.04.	BELANJA PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)	261.270.000,00
2.2.2.12.05.	BELANJA PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU)	44.000.000,00
2.2.2.12.06.	BELANJA PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)	122.000.000,00
2.2.2.13.	BELANJA PAKAIAN KERJA	1.236.930.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
2.2.2.13.01.	BELANJA PAKAIAN KERJA LAPANGAN	1.236.930.000,00
2.2.2.14.	BELANJA PAKAIAN KHUSUS DAN HARI-HARI TERTENTU	1.375.070.600,00
2.2.2.14.02.	BELANJA PAKAIAN ADAT DAERAH	18.800.000,00
2.2.2.14.03.	BELANJA PAKAIAN OLAH RAGA	219.525.000,00
2.2.2.14.04.	BELANJA PAKAIAN / KAOS SERAGAM KEGIATAN	1.136.745.600,00
2.2.2.15.	BELANJA PERJALANAN DINAS	155.743.310.963,00
2.2.2.15.01.	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH	104.752.241.613,00
2.2.2.15.02.	BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH	50.638.969.350,00
2.2.2.15.03.	BELANJA PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI	352.100.000,00
2.2.2.16.	BELANJA BEASISWA PENDIDIKAN PNS	2.565.500.000,00
2.2.2.16.02.	BELANJA BEASISWA TUGAS BELAJAR S1	364.500.000,00
2.2.2.16.03.	BELANJA BEASISWA TUGAS BELAJAR S2	2.101.000.000,00
2.2.2.16.04.	BELANJA BEASISWA TUGAS BELAJAR S3	100.000.000,00
2.2.2.17.	BELANJA KURSUS, PELATIHAN, SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS	2.559.397.200,00
2.2.2.17.01.	BELANJA KURSUS-KURSUS SINGKAT / PELATIHAN	1.815.566.400,00
2.2.2.17.02.	BELANJA SOSIALISASI	40.000.000,00
2.2.2.17.03.	BELANJA BIMBINGAN TEKNIS	562.830.800,00
2.2.2.17.04.	BELANJA RAPAT 2)	141.000.000,00
2.2.2.18.	BELANJA PERJALANAN PINDAH TUGAS	50.000.000,00
2.2.2.18.01.	BELANJA PERJALANAN PINDAH TUGAS DALAM DAERAH	50.000.000,00
2.2.2.20.	BELANJA PEMELIHARAAN	6.413.408.000,00
2.2.2.20.03.	BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG	1.149.431.100,00
2.2.2.20.04.	BELANJA PEMELIHARAAN IRIGASI / EMBUNG - EMBUNG	150.000.000,00
2.2.2.20.05.	BELANJA PEMELIHARAAN SYSTEM / INSTALASI	1.583.537.000,00
2.2.2.20.06.	BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	2.399.651.700,00
2.2.2.20.07.	BELANJA PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN	100.000.000,00
2.2.2.20.08.	BELANJA PEMELIHARAAN RUMAH JABATAN/RUMAH DINAS	220.000.000,00
2.2.2.20.10.	BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER DAN JARINGAN	200.974.000,00
2.2.2.20.11.	BELANJA PEMELIHARAAN ALAT BERAT	250.000.000,00
2.2.2.20.12.	BELANJA PEMELIHARAAN MESIN / ALAT - ALAT BENGKEL	150.500.000,00
2.2.2.20.13.	BELANJA PEMELIHARAAN ALAT - ALAT KOMUNIKASI	3.500.000,00
2.2.2.20.14.	BELANJA PEMELIHARAAN ALAT - ALAT STUDIO	7.500.000,00
2.2.2.20.16.	BELANJA PEMELIHARAAN ALAT - ALAT LABORATORIUM	152.500.000,00
2.2.2.20.17.	BELANJA PEMELIHARAAN KAPAL MOTOR	24.000.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
2.2.2.20.18.	BELANJA PEMELIHARAAN STASIUN HIDROLOGI	18.070.200,00
2.2.2.20.19.	BELANJA PEMELIHARAAN/PERAWATAN BAHAN PUSTAKA	3.744.000,00
2.2.2.21.	BELANJA JASA KONSULTANSI	19.473.481.000,00
2.2.2.21.01.	BELANJA JASA KONSULTANSI PENELITIAN	282.452.000,00
2.2.2.21.02.	BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN	13.813.853.000,00
2.2.2.21.03.	BELANJA JASA KONSULTANSI PENGAWASAN	126.481.000,00
2.2.2.21.04.	BELANJA JASA KONSULTANSI PEMETAAN	69.400.000,00
2.2.2.21.05.	BELANJA JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN BUKU	922.100.000,00
2.2.2.21.06.	BELANJA JASA KAJIAN	4.259.195.000,00
2.2.2.22.	BELANJA PENDIDIKAN	435.000.000,00
2.2.2.22.01.	BELANJA PENDIDIKAN BAGI ANAK PANTI	435.000.000,00
2.2.2.23.	UANG YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT	1.333.250.000,00
2.2.2.23.01.	UANG YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA	232.500.000,00
2.2.2.23.02.	UANG YANG DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT	1.100.750.000,00
2.2.2.24.	BELANJA HIBAH BARANG DAN JASA	44.596.330.500,00
2.2.2.24.01.	BELANJA HIBAH BARANG DAN JASA YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT	43.515.530.500,00
2.2.2.24.02.	BELANJA HIBAH BARANG DAN JASA YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA PIHAK KETIGA	1.080.800.000,00
2.2.2.25.	BELANJA BANTUAN SOSIAL BARANG DAN JASA	3.541.606.000,00
2.2.2.25.01.	BELANJA BANTUAN SOSIAL BARANG DAN JASA YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT	3.541.606.000,00
2.2.2.26.	BELANJA PENYELENGGARAAN PROGRAM PEMERINTAH	3.817.800.000,00
2.2.2.26.01.	BELANJA PENYELENGGARAAN PROGRAM DESA MANDIRI	3.817.800.000,00
2.2.2.27.	BELANJA BARANG DAN JASA BLUD	65.132.690.000,00
2.2.2.27.01.	BELANJA BARANG DAN JASA BLUD.	65.132.690.000,00
2.2.3.	BELANJA MODAL	562.136.445.119,00
2.2.3.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN TANAH	50.000.000,00
2.2.3.01.25.	BELANJA MODAL PENGADAAN TANAH PERTANIAN	50.000.000,00
2.2.3.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT BERAT	357.206.600,00
2.2.3.02.10.	BELANJA MODAL PENGADAAN MESIN GENSET	357.206.600,00
2.2.3.03.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	11.735.858.500,00
2.2.3.03.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR SEDAN	600.000.000,00
2.2.3.03.03.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR STATION WAGON	6.259.189.500,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
2.2.3.03.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR BUS	604.700.000,00
2.2.3.03.08.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR BOKS	380.969.000,00
2.2.3.03.09.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR PICK UP	375.000.000,00
2.2.3.03.10.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR AMBULANCE	350.000.000,00
2.2.3.03.12.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR SEPEDA MOTOR	566.000.000,00
2.2.3.03.17.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR.	2.600.000.000,00
2.2.3.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT ANGKUTAN DARAT TIDAK BERMOTOR	10.560.000,00
2.2.3.04.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN GEROBAK	10.560.000,00
2.2.3.06.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT ANGKUTAN DI ATAS AIR TIDAK BERMOTOR	300.000.000,00
2.2.3.06.07.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERAHU DAYUNG	300.000.000,00
2.2.3.08.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT BENGKEL	122.613.900,00
2.2.3.08.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN MESIN LAS	26.963.900,00
2.2.3.08.07.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PENUNJANG BENGKEL	95.650.000,00
2.2.3.09.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT PENGOLAHAN PERTANIAN DAN PETERNAKAN	641.505.000,00
2.2.3.09.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PENERING GABAH	54.450.000,00
2.2.3.09.05.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN LEBAH MADU	40.000.000,00
2.2.3.09.06.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN PENGOLAHAN TANAH	7.200.000,00
2.2.3.09.07.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN PASCA PANEN	201.155.000,00
2.2.3.09.08.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN PETERNAKAN	171.700.000,00
2.2.3.09.10.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN PERIKANAN	167.000.000,00
2.2.3.10.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN KANTOR	307.198.500,00
2.2.3.10.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN MESIN TIK	48.751.800,00
2.2.3.10.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN MESIN HITUNG	5.800.000,00
2.2.3.10.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN MESIN FOTOCOPY	60.796.700,00
2.2.3.10.09.	BELANJA MODAL PENGADAAN PAPAN VISUAL ELEKTRONIK	77.500.000,00
2.2.3.10.10.	BELANJA MODAL PENGADAAN OHP DAN PERLENGKAPANNYA	73.850.000,00
2.2.3.10.11.	BELANJA MODAL PENGADAAN MESIN/KARTU ABSENSI	40.500.000,00
2.2.3.11.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR	3.781.021.775,00
2.2.3.11.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALMARI / RAK ARSIP / RAK BUKU	1.045.823.200,00
2.2.3.11.03.	BELANJA MODAL PENGADAAN BRANKAS	39.723.000,00
2.2.3.11.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN FILLING KABINET	55.929.900,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
2.2.3.11.05.	BELANJA MODAL PENGADAAN WHITE BOARD	2.592.400,00
2.2.3.11.06.	BELANJA MODAL PENGADAAN PENUNJUK WAKTU	1.800.000,00
2.2.3.11.07.	BELANJA MODAL PENGADAAN KARPET	58.050.000,00
2.2.3.11.08.	BELANJA MODAL PENGADAAN TAPLAK MEJA	5.000.000,00
2.2.3.11.09.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT OLAH RAGA	52.500.000,00
2.2.3.11.10.	BELANJA MODAL PENGADAAN PAPAN NAMA KANTOR / PAPAN INFORMASI	78.248.000,00
2.2.3.11.11.	BELANJA MODAL PENGADAAN VACUM CLEANER	2.500.000,00
2.2.3.11.12.	BELANJA MODAL PENGADAAN GENSET	386.500.000,00
2.2.3.11.13.	BELANJA MODAL PENGADAAN POMPA AIR	206.241.000,00
2.2.3.11.14.	BELANJA MODAL PENGADAAN AC	852.486.600,00
2.2.3.11.15.	BELANJA MODAL PENGADAAN TV	245.947.500,00
2.2.3.11.16.	BELANJA MODAL PENGADAAN MESIN PEMOTONG RUMPUT	116.750.000,00
2.2.3.11.18.	BELANJA MODAL PENGADAAN BENDERA UMBUL-UMBUL	2.846.400,00
2.2.3.11.23.	BELANJA MODAL PENGADAAN TIRAI/GORDEN	465.905.775,00
2.2.3.11.24.	BELANJA MODAL PENGADAAN PARABOLA	1.750.000,00
2.2.3.11.26.	BELANJA MODAL PENGADAAN TENDA	130.000.000,00
2.2.3.11.27.	BELANJA MODAL PENGADAAN TABUNG PEMADAM KEBAKARAN	21.340.000,00
2.2.3.11.28.	BELANJA MODAL PENGADAAN KIPAS ANGIN	9.088.000,00
2.2.3.12.	BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER	4.846.633.150,00
2.2.3.12.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER MAINFRAME/SERVER	307.000.000,00
2.2.3.12.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER/PC	1.270.807.550,00
2.2.3.12.03.	BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER NOTE BOOK	839.605.900,00
2.2.3.12.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN PRINTER	405.751.000,00
2.2.3.12.05.	BELANJA MODAL PENGADAAN SCANNER	102.585.700,00
2.2.3.12.06.	BELANJA MODAL PENGADAAN MONITOR/DISPLAY	6.000.000,00
2.2.3.12.08.	BELANJA MODAL PENGADAAN UPS/STABILIZER	145.263.000,00
2.2.3.12.09.	BELANJA MODAL PENGADAAN KELENGKAPAN KOMPUTER (FLASH DISK, MOUSE, KEYBOARD, HARDISK, SPEAKER)	17.260.000,00
2.2.3.12.10.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN JARINGAN KOMPUTER	555.260.000,00
2.2.3.12.11.	BELANJA MODAL PENGADAAN SOFTWARE APLIKASI	1.160.000.000,00
2.2.3.12.12.	BELANJA MODAL PERANGKAT LUNAK DATABASE	12.500.000,00
2.2.3.12.15.	BELANJA MODAL PERANGKAT LUNAK UTILITAS	24.600.000,00
2.2.3.13.	BELANJA MODAL PENGADAAN MEBEULAIR	2.582.234.800,00
2.2.3.13.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN MEJA KERJA	867.262.500,00
2.2.3.13.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN MEJA RAPAT	55.252.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
2.2.3.13.03.	BELANJA MODAL PENGADAAN MEJA MAKAN	63.750.000,00
2.2.3.13.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN KURSI KERJA	602.343.200,00
2.2.3.13.05.	BELANJA MODAL PENGADAAN KURSI RAPAT	198.142.000,00
2.2.3.13.06.	BELANJA MODAL PENGADAAN KURSI MAKAN	16.250.000,00
2.2.3.13.07.	BELANJA MODAL PENGADAAN TEMPAT TIDUR	158.410.000,00
2.2.3.13.08.	BELANJA MODAL PENGADAAN SOFA	199.142.500,00
2.2.3.13.09.	BELANJA MODAL PENGADAAN RAK TV/KEMBANG	32.759.600,00
2.2.3.13.10.	BELANJA MODAL PENGADAAN KURSI SEKOLAH	16.625.000,00
2.2.3.13.11.	BELANJA MODAL PENGADAAN MEJA SEKOLAH	25.250.000,00
2.2.3.13.12.	BELANJA MODAL PENGADAAN KURSI TAMU	66.548.000,00
2.2.3.13.14.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGKU	28.500.000,00
2.2.3.13.15.	BELANJA MODAL PENGADAAN MIMBAR / PANGGUNG	252.000.000,00
2.2.3.14.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN DAPUR	475.202.700,00
2.2.3.14.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN TABUNG GAS	1.500.000,00
2.2.3.14.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPOR GAS / MINYAK TANAH	850.000,00
2.2.3.14.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN DISPENSER	44.400.000,00
2.2.3.14.05.	BELANJA MODAL PENGADAAN KULKAS	26.292.700,00
2.2.3.14.06.	BELANJA MODAL PENGADAAN RAK PIRING	13.500.000,00
2.2.3.14.07.	BELANJA MODAL PENGADAAN PIRING / GELAS / MANGKOK / CANGKIR / SENDOK / GARPU / PISAU	89.110.000,00
2.2.3.14.08.	BELANJA MODAL PENGADAAN RICE COOKER	2.800.000,00
2.2.3.14.09.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN MASAK	288.750.000,00
2.2.3.14.10.	BELANJA MODAL PENGADAAN MESIN CUCI	8.000.000,00
2.2.3.15.	BELANJA MODAL PENGADAAN PENGHIAS RUANGAN RUMAH TANGGA	455.950.000,00
2.2.3.15.03.	BELANJA MODAL GORDEN/KASUR/SEPREI/KARPET	455.950.000,00
2.2.3.16.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT STUDIO	1.517.113.750,00
2.2.3.16.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN KAMERA	364.131.150,00
2.2.3.16.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN HANDYCAM	110.495.200,00
2.2.3.16.03.	BELANJA MODAL PENGADAAN LCD/PROYEKTOR	302.210.400,00
2.2.3.16.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN MICROPHONE/WIRELESS/PENGeras SUARA LAINNYA	92.850.000,00
2.2.3.16.05.	BELANJA MODAL PENGADAAN SOUND SYSTEM	614.427.000,00
2.2.3.16.08.	BELANJA MODAL PENGADAAN LAYAR/SCREEN	15.000.000,00
2.2.3.16.10.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT REKAM	18.000.000,00
2.2.3.17.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT KOMUNIKASI	189.215.850,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
2.2.3.17.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN TELEPON	4.000.000,00
2.2.3.17.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN FAXIMILI	13.090.850,00
2.2.3.17.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN RADIO HF/FM (HANDY TALKIE)	35.475.000,00
2.2.3.17.06.	BELANJA MODAL PENGADAAN RADIO UHF	1.000.000,00
2.2.3.17.09.	BELANJA MODAL PENGADAAN PEMANCAR DAN PERLENGKAPANNYA	31.000.000,00
2.2.3.17.10.	BELANJA MODAL PENGADAAN MEDIA PENGUMUMAN	89.650.000,00
2.2.3.17.11.	BELANJA MODAL PENGADAAN PAPAN BALIHO	15.000.000,00
2.2.3.18.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT UKUR	1.354.320.000,00
2.2.3.18.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN TIMBANGAN	251.500.000,00
2.2.3.18.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT GPS	93.100.000,00
2.2.3.18.06.	BELANJA MODAL PENGADAAN BEJANA UKUR	51.820.000,00
2.2.3.18.18.	BELANJA MODAL PENGADAAN METERAN AIR	60.000.000,00
2.2.3.18.19.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT UKUR LAINNYA	897.900.000,00
2.2.3.19.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT KEDOKTERAN	76.091.674.140,00
2.2.3.19.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT KEDOKTERAN UMUM	1.306.349.880,00
2.2.3.19.06.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT KEDOKTERAN ANAK	682.000.000,00
2.2.3.19.07.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT KEDOKTERAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN	2.922.471.000,00
2.2.3.19.10.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT KEDOKTERAN NEUROLOGI	8.076.745.570,00
2.2.3.19.12.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT KEDOKTERAN HEWAN	130.815.000,00
2.2.3.19.17.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT ALAT KEDOKTERAN ICU	446.160.000,00
2.2.3.19.18.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN KEDOKTERAN LAINNYA	52.301.785.690,00
2.2.3.19.19.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT ALAT KEDOKTERAN IGD	2.726.147.000,00
2.2.3.19.20.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT KEDOKTERAN RADIOLOGI	499.200.000,00
2.2.3.19.21.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT KEDOKTERAN ICCU	7.000.000.000,00
2.2.3.20.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT LABORATORIUM	7.424.840.200,00
2.2.3.20.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	714.357.600,00
2.2.3.20.05.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT LABORATORIUM PETERNAKAN	57.376.600,00
2.2.3.20.07.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT LABORATORIUM PERIKANAN	4.210.190.000,00
2.2.3.20.11.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM KESEHATAN	135.000.000,00
2.2.3.20.12.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	527.916.000,00
2.2.3.20.13.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT LABORATORIUM PENGUJIAN	1.780.000.000,00
2.2.3.21.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI JALAN	231.941.239.000,00
2.2.3.21.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI JALAN.	231.941.239.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
2.2.3.22.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI JEMBATAN	22.394.435.000,00
2.2.3.22.06.	BELANJA MODAL PENGADAAN JEMBATAN	22.394.435.000,00
2.2.3.23.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI JARINGAN AIR	73.878.455.550,00
2.2.3.23.05.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI	51.502.742.950,00
2.2.3.23.06.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI JARINGAN AIR BERSIH/AIR MINUM	11.104.215.000,00
2.2.3.23.09.	BELANJA MODAL PENGADAAN TURAP/TANGGUL	6.180.445.800,00
2.2.3.23.10.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI DRAINASE	3.640.500.000,00
2.2.3.23.13.	BELANJA MODAL PEKERJAAN PENGEBORAN SUMUR BOR	741.095.300,00
2.2.3.23.14.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI BAK PENAMPUNGAN	709.456.500,00
2.2.3.25.	BELANJA MODAL PENGADAAN INSTALASI LISTRIK DAN TELEPON	554.500.000,00
2.2.3.25.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN INSTALASI LISTRIK	390.000.000,00
2.2.3.25.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN INSTALASI TELEPON	164.500.000,00
2.2.3.26.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI/PEMBELIAN BANGUNAN	106.852.976.004,00
2.2.3.26.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI/PEMBELIAN GEDUNG KANTOR	84.978.379.260,00
2.2.3.26.03.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI/PEMBELIAN RUMAH DINAS	858.381.300,00
2.2.3.26.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI / PEMBELIAAN GEDUNG GUDANG	892.701.800,00
2.2.3.26.06.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI/PEMBELIAN BANGUNAN MONUMEN	570.000.000,00
2.2.3.26.10.	BELANJA MODAL PENGADAAN SEKAT RUANGAN	124.000.000,00
2.2.3.26.12.	BELANJA MODAL PENGADAAN PEMAGARAN	2.885.213.144,00
2.2.3.26.26.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI TAMAN	80.000.000,00
2.2.3.26.27.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI/PEMBELIAN GEDUNG PUSAT HIBURAN RAKYAT	11.163.591.000,00
2.2.3.26.29.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI/PEMBELIAN GEDUNG SARANA OLAHRAGA	949.998.400,00
2.2.3.26.31.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI/PEMBELIAN GEDUNG ASRAMA	503.136.000,00
2.2.3.26.32.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI/PEMBELIAN GEDUNG SARANA INDUSTRI	848.099.300,00
2.2.3.26.34.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI/PEMBELIAN POS JAGA/RONDA	105.000.000,00
2.2.3.26.39.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN PETERNAKAN	2.118.918.800,00
2.2.3.26.40.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI LAHAN PARKIR	260.000.000,00
2.2.3.26.41.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN BUDIDAYA PERIKANAN	50.000.000,00
2.2.3.26.42.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI BANGUNAN PERTANIAN	465.557.000,00
2.2.3.27.	BELANJA MODAL PENGADAAN BUKU/KEPUSTAKAAN	498.220.700,00
2.2.3.27.12.	BELANJA MODAL PENGADAAN BUKU SENI DAN BUDAYA	2.000.000,00
2.2.3.27.13.	BELANJA MODAL PENGADAAN BUKU ILMU PENGETAHUAN UMUM	328.518.700,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
2.2.3.27.15.	BELANJA MODAL PENGADAAN BUKU ILMU POLITIK DAN KETATANEGARAAN	2.000.000,00
2.2.3.27.16.	BELANJA MODAL PENGADAAN BUKU ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	2.000.000,00
2.2.3.27.19.	BELANJA MODAL PENGADAAN BUKU EKONOMI DAN KEUANGAN	2.000.000,00
2.2.3.27.21.	BELANJA MODAL PENGADAAN BUKU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	120.702.000,00
2.2.3.27.24.	BELANJA MODAL PENGADAAN PETA/ATLAS/GLOBE	26.000.000,00
2.2.3.27.26.	BELANJA MODAL PENGADAAN BUKU KESEHATAN	2.000.000,00
2.2.3.27.27.	BELANJA MODAL PENGADAAN BUKU KOLEKSI DEPOSIT	13.000.000,00
2.2.3.28.	BELANJA MODAL PENGADAAN BARANG BERCORAK KESENIAN, KEBUDAYAAN	320.000.000,00
2.2.3.28.08.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PERMAINAN EDUKATIF	150.000.000,00
2.2.3.28.10.	BELANJA MODAL PENGADAAN BENDA KOLEKSI MUSEUM	170.000.000,00
2.2.3.29.	BELANJA MODAL PENGADAAN HEWAN/TERNAK DAN TANAMAN	7.071.800.000,00
2.2.3.29.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN TERNAK	7.071.800.000,00
2.2.3.30.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT PERSENJATAAN/KEAMANAN	1.302.450.000,00
2.2.3.30.07.	BELANJA MODAL PENGADAAN DETEKTOR LOGAM	1.300.000.000,00
2.2.3.30.12.	BELANJA MODAL PENGADAAN SENTOLOP/SENTER	2.450.000,00
2.2.3.32.	BELANJA MODAL PENGADAAN KELENGKAPAN PENGAMANAN JALAN	3.050.220.000,00
2.2.3.32.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN MARKA JALAN	86.733.088,00
2.2.3.32.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN PAGAR PEMBATAS JALAN	2.205.386.000,00
2.2.3.32.03.	BELANJA MODAL PENGADAAN RAMBU LALU LINTAS JALAN	758.100.912,00
2.2.3.35.	BELANJA MODAL PENGADAAN INSTALASI JARINGAN	5.000.000,00
2.2.3.35.03.	BELANJA MODAL PENGADAAN INSTALASI JARINGAN INTERNET	5.000.000,00
2.2.3.36.	BELANJA MODAL BLUD	2.024.000.000,00
2.2.3.36.01.	BELANJA MODAL BLUD.	2.024.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	3.289.126.340.000,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(6.461.306.100,00)
3.	PEMBIAYAAN DAERAH	6.461.306.100,00
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	61.161.306.100,00
3.1.1.	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA	53.779.434.100,00
3.1.1.01.	PELAMPAUAN PENERIMAAN PAD	8.500.000.000,00
3.1.1.01.01.	PAJAK DAERAH	5.000.000.000,00
3.1.1.01.04.	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	3.500.000.000,00
3.1.1.04.	SISA PENGHEMATAN BELANJA ATAU AKIBAT LAINNYA	45.279.434.100,00
3.1.1.04.01.	BELANJA PEGAWAI DARI BELANJA TIDAK LANGSUNG	12.000.000.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
3.1.1.04.02.	BELANJA PEGAWAI DARI BELANJA LANGSUNG	4.000.000.000,00
3.1.1.04.03.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.079.434.100,00
3.1.1.04.04.	BELANJA MODAL	11.100.000.000,00
3.1.1.04.07.	BELANJA HIBAH	2.500.000.000,00
3.1.1.04.08.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	5.000.000.000,00
3.1.1.04.11.	BELANJA BELANJA TIDAK TERDUGA	1.600.000.000,00
3.1.5.	PENERIMAAN KEMBALI DARI PEMBERIAN PINJAMAN	7.381.872.000,00
3.1.5.01.	PENERIMAAN KEMBALI DARI PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH	7.381.872.000,00
3.1.5.01.01.	PENERIMAAN POKOK DANA KREDIT RODA DUA	2.420.944.000,00
3.1.5.01.02.	PENERIMAAN POKOK DANA KREDIT RODA EMPAT	1.960.928.000,00
3.1.5.01.03.	PENERIMAAN POKOK PINJAMAN KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT	3.000.000.000,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	61.161.306.100,00
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	54.700.000.000,00
3.2.2.	PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH	50.000.000.000,00
3.2.2.02.	BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)	50.000.000.000,00
3.2.2.02.02.	BANK NTT	50.000.000.000,00
3.2.4.	PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH	4.700.000.000,00
3.2.4.03.	PEMBERIAN PINJAMAN MODAL KEPADA PIHAK KETIGA	4.700.000.000,00
3.2.4.03.02.	PEMBERIAN PINJAMAN KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT (DUNIA USAHA)	4.700.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	54.700.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETO	6.461.306.100,00
3.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	-


 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
 FRANS LEBU RAYA

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN 2015

Kode	Uraian	Pendapatan	Belanja		
			Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja
1	2	3	4	5	6
1.	URUSAN WAJIB	3.272.142.733.900,00	1.971.180.674.000,00	1.053.306.581.850,00	3.024.487.255.850,00
1.01.	PENDIDIKAN	287.000.000,00	20.558.644.000,00	36.733.864.000,00	57.292.508.000,00
1.01.01.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	287.000.000,00	20.558.644.000,00	36.733.864.000,00	57.292.508.000,00
1.02.	KESEHATAN	64.035.000.000,00	87.095.185.000,00	191.450.110.000,00	278.545.295.000,00
1.02.01.	Dinas Kesehatan	535.000.000,00	18.106.198.000,00	72.900.930.200,00	91.007.128.200,00
1.02.02.	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	63.500.000.000,00	68.988.987.000,00	118.549.179.800,00	187.538.166.800,00
1.03.	PEKERJAAN UMUM	500.000.000,00	32.990.969.000,00	358.094.182.000,00	391.085.151.000,00
1.03.01.	Dinas Pekerjaan Umum	500.000.000,00	32.990.969.000,00	358.094.182.000,00	391.085.151.000,00
1.04.	PERUMAHAN	-	-	-	-
1.05.	PENATAAN RUANG	-	-	-	-
1.06.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	-	15.074.658.000,00	52.960.248.500,00	68.034.906.500,00
1.06.01.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	7.508.157.000,00	47.737.797.500,00	55.245.954.500,00
1.06.02.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	-	3.652.490.000,00	2.114.751.100,00	5.767.241.100,00
1.06.03.	Badan Penelitian dan Pengembangan	-	3.914.011.000,00	3.107.699.900,00	7.021.710.900,00
1.07.	PERHUBUNGAN	486.475.000,00	12.019.379.000,00	10.963.637.900,00	22.983.016.900,00
1.07.01.	Dinas Perhubungan	486.475.000,00	12.019.379.000,00	10.963.637.900,00	22.983.016.900,00
1.08.	LINGKUNGAN HIDUP	150.000.000,00	6.110.041.000,00	5.719.973.650,00	11.830.014.650,00
1.08.01.	Badan Lingkungan Hidup Daerah	150.000.000,00	6.110.041.000,00	5.719.973.650,00	11.830.014.650,00
1.10.	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	-	-	-	-
1.11.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	4.347.161.000,00	3.841.128.000,00	8.188.289.000,00
1.11.01.	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	4.347.161.000,00	3.841.128.000,00	8.188.289.000,00
1.12.	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	-	-	-	-
1.13.	SOSIAL	400.000.000,00	16.740.501.000,00	24.920.530.600,00	41.661.031.600,00
1.13.01.	Dinas Sosial	400.000.000,00	16.740.501.000,00	24.920.530.600,00	41.661.031.600,00
1.14.	KETENAGAKERJAAN	80.000.000,00	13.590.369.000,00	8.549.228.200,00	22.139.597.200,00
1.14.01.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	80.000.000,00	13.590.369.000,00	8.549.228.200,00	22.139.597.200,00
1.15.	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	100.000.000,00	7.416.680.000,00	5.692.629.000,00	13.109.309.000,00
1.15.01.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	100.000.000,00	7.416.680.000,00	5.692.629.000,00	13.109.309.000,00
1.16.	PENANAMAN MODAL	-	3.866.509.000,00	7.334.027.000,00	11.200.536.000,00
1.16.01.	Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah	-	3.866.509.000,00	7.334.027.000,00	11.200.536.000,00
1.17.	KEBUDAYAAN	-	-	-	-
1.18.	PEMUDA DAN OLAHRAGA	210.000.000,00	8.381.495.000,00	8.139.841.900,00	16.521.336.900,00
1.18.01.	Dinas Pemuda dan Olahraga	210.000.000,00	8.381.495.000,00	8.139.841.900,00	16.521.336.900,00
1.19.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	-	16.447.664.000,00	9.142.651.300,00	25.590.315.300,00
1.19.01.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	4.792.836.000,00	3.222.733.000,00	8.015.569.000,00
1.19.02.	Satuan Polisi Pamong Praja	-	7.710.964.000,00	2.617.538.800,00	10.328.502.800,00
1.19.03.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	3.943.864.000,00	3.302.379.500,00	7.246.243.500,00
1.20.	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	3.205.815.458.900,00	1.693.180.985.000,00	298.882.725.450,00	1.992.063.710.450,00

Kode	Uraian	Pendapatan	Belanja		Jumlah Belanja
			Tidak Langsung	Langsung	
1	2	3	4	5	6
1.20.01.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-	19.614.984.000,00	-	19.614.984.000,00
1.20.02.	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	1.604.557.000,00	-	1.604.557.000,00
1.20.03.	Sekretariat Daerah	2.539.998.215.900,00	1.544.967.799.000,00	-	1.544.967.799.000,00
1.20.03.01.	Biro Umum	150.000.000,00	48.029.652.000,00	106.347.684.500,00	154.377.336.500,00
1.20.03.02.	Biro Keuangan	-	-	18.265.711.625,00	18.265.711.625,00
1.20.03.03.	Biro Hukum	-	-	2.929.618.125,00	2.929.618.125,00
1.20.03.04.	Biro Organisasi	-	-	2.972.349.800,00	2.972.349.800,00
1.20.03.05.	Biro Administrasi Pembangunan	-	-	3.775.273.800,00	3.775.273.800,00
1.20.03.06.	Biro Perekonomian	-	-	3.875.358.000,00	3.875.358.000,00
1.20.03.07.	Biro Kesejahteraan Rakyat	-	-	7.269.660.000,00	7.269.660.000,00
1.20.03.08.	Biro Pemerintahan	-	-	3.150.292.000,00	3.150.292.000,00
1.20.03.09.	Biro Hubungan Masyarakat	-	-	5.498.426.000,00	5.498.426.000,00
1.20.04.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-	10.009.291.000,00	50.026.335.000,00	60.035.626.000,00
1.20.05.	Inspektorat	-	7.678.806.000,00	9.697.502.650,00	17.376.308.650,00
1.20.06.	Kantor Penghubung	350.000.000,00	-	6.786.420.000,00	6.786.420.000,00
1.20.07.	Dinas Pendapatan dan Aset Daerah	644.953.583.000,00	40.802.177.000,00	40.681.369.500,00	81.483.546.500,00
1.20.08.	Badan Pendidikan dan Pelatihan	19.363.660.000,00	8.693.062.000,00	24.543.328.450,00	33.236.390.450,00
1.20.09.	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	1.000.000.000,00	2.696.502.000,00	1.736.916.000,00	4.433.418.000,00
1.20.10.	Sekretariat Dewan Korpri	-	2.162.917.000,00	2.005.760.000,00	4.168.677.000,00
1.20.11.	Badan Kepegawaian Daerah	-	6.921.238.000,00	9.320.720.000,00	16.241.958.000,00
1.21.	KETAHANAN PANGAN	-	8.555.254.000,00	9.153.386.000,00	17.708.640.000,00
1.21.01.	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	-	8.555.254.000,00	9.153.386.000,00	17.708.640.000,00
1.22.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	16.000.000,00	4.873.860.000,00	8.474.452.800,00	13.348.312.800,00
1.22.01.	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	16.000.000,00	4.873.860.000,00	8.474.452.800,00	13.348.312.800,00
1.23.	STATISTIK	-	-	-	-
1.24.	KEARSIPAN	-	4.269.053.000,00	2.120.031.550,00	6.389.084.550,00
1.24.01.	Badan Arsip	-	4.269.053.000,00	2.120.031.550,00	6.389.084.550,00
1.25.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	22.800.000,00	8.464.644.000,00	7.474.664.000,00	15.939.308.000,00
1.25.01.	Dinas Komunikasi dan Informatika	22.800.000,00	5.663.250.000,00	3.442.476.000,00	9.105.726.000,00
1.25.02.	Kantor Pengolahan Data Elektronik	-	1.677.609.000,00	2.554.030.000,00	4.231.639.000,00
1.25.03.	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia	-	1.123.785.000,00	1.478.158.000,00	2.601.943.000,00
1.26.	PERPUSTAKAAN	40.000.000,00	7.197.623.000,00	3.659.270.000,00	10.856.893.000,00
1.26.01.	Badan Perpustakaan Daerah	40.000.000,00	7.197.623.000,00	3.659.270.000,00	10.856.893.000,00
2.	URUSAN PILIHAN	10.522.300.000,00	82.170.091.000,00	182.468.993.150,00	264.639.084.150,00
2.01.	PERTANIAN	5.000.000.000,00	41.034.351.000,00	69.436.313.000,00	110.470.664.000,00
2.01.01.	Dinas Pertanian dan Perkebunan	1.000.000.000,00	27.171.589.000,00	38.829.744.000,00	66.001.333.000,00
2.01.02.	Dinas Peternakan	4.000.000.000,00	13.862.762.000,00	30.606.569.000,00	44.469.331.000,00
2.02.	KEHUTANAN	85.000.000,00	6.975.895.000,00	15.372.331.200,00	22.348.226.200,00
2.02.01.	Dinas Kehutanan	85.000.000,00	5.957.942.000,00	12.793.138.200,00	18.751.080.200,00
2.02.02.	Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung	-	1.017.953.000,00	2.579.193.000,00	3.597.146.000,00
2.03.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	250.000.000,00	6.774.998.000,00	15.933.803.000,00	22.708.801.000,00
2.03.01.	Dinas Pertambangan dan Energi	250.000.000,00	6.774.998.000,00	15.933.803.000,00	22.708.801.000,00
2.04.	PARIWISATA	400.000.000,00	6.179.710.000,00	16.588.246.600,00	22.767.956.600,00
2.04.01.	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	400.000.000,00	6.179.710.000,00	16.588.246.600,00	22.767.956.600,00
2.05.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.496.000.000,00	11.051.922.000,00	53.440.111.000,00	64.492.033.000,00

Kode	Uraian	Pendapatan	Belanja		
			Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja
1	2	3	4	5	6
2.05.01.	Dinas Kelautan dan Perikanan	4.496.000.000,00	11.051.922.000,00	53.440.111.000,00	64.492.033.000,00
2.06.	PERDAGANGAN	-	-	-	-
2.07.	INDUSTRI	291.300.000,00	10.153.215.000,00	11.698.188.350,00	21.851.403.350,00
2.07.01.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	291.300.000,00	10.153.215.000,00	11.698.188.350,00	21.851.403.350,00
2.08.	KETRANSMIGRASIAN	-	-	-	-
Jumlah		3.282.665.033.900,00	2.053.350.765.000,00	1.235.775.575.000,00	3.289.126.340.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(6.461.306.100)			

Kode	Uraian	Pembiayaan			SILPA TAB Netto
		Penerimaan	Pengeluaran	Pembiayaan	
1	2	3	4	5	6
	URUSAN WAJIB	61.161.306.100,00	54.700.000.000,00	6.461.306.100,00	-
	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	61.161.306.100,00	54.700.000.000,00	6.461.306.100,00	-
	Sekretariat Daerah	61.161.306.100,00	54.700.000.000,00	6.461.306.100,00	-

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



FRANS LEBU RAYA